

## Memilih Buku Pelajaran

**Dr. B.P. Sitepu, M.A<sup>\*)</sup>**

### Abstrak

**S**ejak pembangunan jangka panjang pertama (1970–1995) dan sampai sekarang ini, Pemerintah menyediakan buku pelajaran untuk semua sekolah. Berbagai kebijakan dan sistem penyediaan buku pelajaran telah ditempuh serta banyak dana sudah dihabiskan baik bersumber dari dalam negeri maupun dari berbagai bentuk pinjaman dari luar negeri. Akan tetapi buku pelajaran sampai sekarang ini tidak sepi dari masalah dan kritikan apalagi menjelang dan mengawali tahun pelajaran baru. Dalam kenyataannya masyarakat masih dibebani penyediaan buku pelajaran baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Sekolah juga sering memilih dan membeli buku pelajaran dari penerbit yang menawarkan buku pelajaran ke sekolah. Tulisan ini membahas kebijakan penyediaan buku pelajaran itu dan menawarkan kepada sekolah cara mencermati dan memilih buku pelajaran sehingga sedapat mungkin memenuhi tuntutan kurikulum serta dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Sekolah dianggap perlu mengetahui cara memilih buku pelajaran yang bermutu karena selaras dengan perkembangan penerbitan buku di Indonesia dewasa ini alternatif pilihan buku pelajaran semakin banyak.

Kata kunci : buku pelajaran, bahan ajar, metode pembelajaran, bahasa, ilustrasi, grafika

### *Abstract*

*In the first long term development (1970 – 1995), the Indonesian Government tried to provide all schools with free textbooks. A number of regulations in textbook provision have been implemented and the Government has spent a big amount of budget from local and foreign sources. However, the facts show that there are still many problems and critiques in the textbook provision. The issues become more serious particularly at the beginning of new academic*

---

\*) Dosen Universitas Negeri Jakarta

*years when the parents have to pay textbooks for their children. The parents also complain that the schools change the textbooks every academic year without reasonable reasons this happens in government and private schools, while the Government declares his free textbook policy. This article discusses the government textbook policy and offers the schools some considerations in selecting appropriate textbooks for instructional purposes. As the number of textbooks available is growing fast and the schools have to make choices, the schools should know properly how to assess and to select the text books.*

### **Pendahuluan**

Untuk meningkatkan kecerdasan bangsa secara menyeluruh dan merata sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan dalam arti luas memegang peranan penting. Pendidikan formal diselenggarakan melalui suatu sistem yang diatur oleh Pemerintah sehingga setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun memperoleh pendidikan seluas-luasnya sesuai dengan kemampuan intelektual dan fisiknya.

Sungguhpun penyelenggaraan pendidikan secara umum menjadi tanggung jawab Pemerintah, orangtua dan masyarakat, akan tetapi secara konstitusional Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena itu Pemerintah berupaya menyediakan tenaga, dana, gedung serta sarana fisik lainnya sehingga setiap warga negara Indonesia dapat memperoleh pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 31, ayat 1, UUD 1945. Di samping itu Pemerintah juga bertanggung jawab atas mutu pendidikan nasional sehingga sumber daya yang dihasilkan melalui sistem pendidikan nasional dapat membangun dirinya sendiri serta lingkungannya menuju kehidupan yang cerdas dan berkualitas secara jasmani dan rohani.

Buku pelajaran merupakan salah satu sumber belajar dan membelajarkan yang memberikan andil yang cukup besar dalam upaya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan sekali gus juga meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Kebutuhan akan buku pelajaran semakin terasa dikala jumlah dan mutu guru yang tersedia belum memadai. Di tempat-tempat tertentu masih banyak guru yang mengandalkan buku pelajaran sebagai satu-satunya sumber belajar dan pembelajaran. Guru mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan mengacu sepenuhnya pada isi buku pelajaran. Siswa juga menggunakan buku pelajaran di sekolah dan di rumah sebagai sumber belajar utama. Di banyak negara, khususnya yang masih memiliki keterbatasan sarana dan kemudahan teknologi informasi dan teknologi komunikasi maju, masih mengandalkan buku pelajaran sebagai sumber belajar dan membelajarkan di sekolah. Masalah yang dihadapi ialah

bagaimana caranya menghadirkan buku pelajaran yang bermutu di setiap sekolah secara tepat waktu serta tepat jumlah?

Indonesia sendiri sejak tahun 1970 menyediakan buku pelajaran untuk sekolah dasar dan lanjutan dengan target satu buku untuk setiap siswa. Di samping itu disediakan pula secara bertahap buku-buku perpustakaan untuk setiap sekolah negeri dan swasta. Kebijakan penyediaan buku pelajaran yang lebih dikenal dengan "buku paket" itu diteruskan oleh Pemerintah setiap kali terjadi perubahan kurikulum, mulai dari Kurikulum 1968, 1975 atau 1976, 1984, 1994, sampai 2004. Akan tetapi sejauh manakah keberhasilan proyek buku pelajaran ini memberikan kontribusi dalam pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi setiap anak usia sekolah serta dalam meningkatkan mutu proses dan hasil belajar dan membelajarkan? Berbagai penelitian telah dilakukan dan nampaknya proyek yang menelan biaya besar ini belum dapat memuaskan guru, siswa, dan orang tua. Masih sering terdengar keluhan tentang buku pelajaran dari berbagai pihak, yang sudah barang tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja.

### **Kebijakan**

Pada awal tahun tujuh puluhan ketika Pemerintah secara sistematis dan sistemik hendak mengatasi masalah-masalah pendidikan secara nasional, penyediaan buku pelajaran merupakan salah satu prioritas yang mendesak dilakukan di samping pengadaan guru dan gedung sekolah. Akan tetapi buku pelajaran itu tidak dapat serta merta disediakan pada saat dibutuhkan karena mutu buku pelajaran yang beredar pada waktu itu tidak dapat memenuhi tuntutan minimal kurikulum yang berlaku. Isi dan metode pembelajaran di dalam buku tidak mengikuti perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan untuk keperluan koleksi perpustakaan sekolah sajakpun, tidak sampai separuh atau hanya sekitar 49% dari buku yang dinilai itu dianggap layak dijadikan koleksi perpustakaan sekolah. Tidak ada satupun dari antara buku yang dinilai itu memenuhi syarat dijadikan buku pelajaran untuk salah satu mata pelajaran di Pendidikan Dasar atau Pendidikan Menengah. Perlu dicatat bahwa jumlah penerbit serta mutu buku yang dihasilkan dalam kurun waktu itu masih jauh tertinggal dibandingkan dengan lima tahun belakangan ini.

Dilihat dari pemakaiannya di kelas, buku sekolah dapat dibedakan menjadi buku pelajaran pokok dan buku pelengkap. Buku pelajaran pokok adalah buku yang disusun mengacu pada kurikulum dan dipergunakan oleh siswa dan guru sebagai sumber utama dalam proses belajar dan membelajarkan. Sedangkan buku pelengkap adalah semua buku bacaan lain yang dapat dipergunakan untuk memperkaya kemampuan dan pengalaman belajar siswa. Dalam tulisan

ini pembahasan dibatasi pada buku pelajaran (pokok) yang kedudukannya sangat strategis dalam proses belajar dan membelajarkan.

Memperhatikan kurangnya jumlah buku pelajaran yang bermutu di satu pihak dan kebutuhan akan buku pelajaran di pihak lain, maka mulai Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I, Pemerintah menetapkan kebijakan penyediaan buku pelajaran yang intinya dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1: Penyediaan Buku Pelajaran Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1970 sampai Tahun 1997**

Kegiatan	Pemerintah	Swasta	Sekolah
1. Menyusun/mempersiapkan naskah	V		
2. Menilai naskah	V		
3. Menerbitkan naskah	V		
4. Mencetak naskah menjadi buku		V	
5. Mengirim buku ke sekolah		V	
6. Menggunakan buku			V
7. Mengawasi semua kegiatan	V		
8. Menyediakan dana untuk semua kegiatan	V		

Naskah buku pelajaran ditulis dan dinilai oleh guru atau ahli bidang studi atas penunjukan oleh Pemerintah yang dalam hal ini lembaga/instansi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Setelah melalui proses uji coba, revisi, dan penyuntingan, naskah dicetak oleh percetakan swasta (dan milik negara) sehingga menjadi buku dengan hak penerbitan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang sekarang ini disebut Departemen Pendidikan Nasional. Penyaluran buku dari percetakan ke sekolah dilakukan oleh ekspediter swasta dengan alokasi dan lokasi pendistribusian ditetapkan oleh Pemerintah. Penyusunan dan penilaian naskah, pencetakan dan penerbitan naskah dikelola secara terpusat sehingga sangat bersifat sentralistik.

Dilihat dari pelaksana kedelapan kegiatan pokok penyediaan buku pelajaran, Pemerintah mendominasi kegiatan, dan pihak swasta berperan terbatas pada jasa pencetakan dan pengiriman buku. Sementara itu pihak sekolah berperan hanya sebagai pemakai atau konsumen buku pelajaran itu. Semua kegiatan dalam penyediaan buku pelajaran itu sampai tiba di sekolah sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah. Buku yang disediakan itu menjadi milik sekolah (negeri dan swasta) dan dipinjamkan kepada siswa secara cuma-cuma.

Kebijakan ini berlaku untuk penyediaan buku pelajaran Kurikulum 1968, 1975 atau 1976, 1984, dan 1994 atau sampai tahun 1995. Dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut dihadapi berbagai masalah yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Buku pelajaran yang disediakan Pemerintah tidak pernah tersedia di sekolah tepat pada waktu kurikulum mulai diberlakukan. Penyusunan dan penerbitan naskah sampai pengirimannya ke sekolah memerlukan waktu antara 3 sampai 4 tahun. Dengan demikian sekolah terpaksa mencari buku pelajaran lain untuk mengisi kekosongan buku pelajaran. Pemberlakuan Kurikulum 1994 secara bertahap untuk memberikan waktu untuk menyediakan sarana pendidikan yang diperlukan termasuk buku pelajaran nampaknya tidak banyak memecahkan masalah.
2. Oleh karena berbagai kendala, Pemerintah menyediakan buku pelajaran secara bertahap dilihat dari jumlah dan mata pelajaran; Pemerintah tidak menyediakan buku pelajaran sekaligus untuk semua mata pelajaran dan sekaligus untuk semua siswa. Sekolah memilih buku pelajaran lain untuk mata pelajaran yang bukunya belum disediakan Pemerintah.
3. Alokasi buku untuk sekolah jarang sesuai benar dengan kebutuhan nyata berdasarkan jumlah siswa; di sekolah tertentu terdapat kekurangan buku sementara di sekolah lain terdapat kelebihan buku.
4. Sungguhpun disusun oleh para ahli dan telah melalui proses uji coba dan penyempurnaan, buku pelajaran yang disediakan Pemerintah tidak luput dari kelemahan dalam materi, bahasa, dan metodologi pembelajaran.
5. Hal-hal seperti yang disebutkan pada butir 1 sampai 4 merupakan alasan bagi sekolah-sekolah tertentu untuk tidak/kurang menggunakan buku pelajaran yang disediakan Pemerintah dan memilih serta menggunakan buku lain sebagai buku pelajaran pokok. Pengadaan buku lain itu dibebankan kepada orangtua siswa dan tidak jarang terjadi setiap ganti tahun pelajaran, sekolah mengganti buku pelajaran.
6. Penerbit menganggap kebijakan Pemerintah menerbitkan sendiri buku pelajaran merupakan praktek monopoli yang tidak kondusif dalam mengembangkan industri buku di Indonesia. Bagi kebanyakan penerbit, lembaga pendidikan atau siswa merupakan pasar yang potensial dan dengan kebijakan yang ada mempersempit pasar mereka dan menghambat perkembangan penerbit.

Dalam dekade tahun sembilan puluhan terjadi kemajuan pesat dalam usaha penerbitan di Indonesia dilihat dari jumlah maupun mutu buku yang diterbitkan. Dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan kebijakan pengadaan buku pelajaran yang diterapkan dalam tahun 1970 – 1995 serta melihat kemajuan penerbitan di Indonesia, maka Pemerintah nampaknya merasa perlu menyempurnakan kebijakan itu secara bertahap. Perubahan kebijakan diawali dengan sasaran buku pelajaran SLTP/MTs dengan menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia. Melalui Proyek ini dicobakan kebijakan baru yang kemudian dikembangkan juga untuk buku pelajaran di

SD/MI dan SMA/MA. Dalam kebijakan ini terlihat peranan Pemerintah dikurangi dan peranan swasta ditingkatkan. Penyediaan buku pelajaran dilakukan melalui pembelian dari penerbit dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah. Dalam tabel berikut ini terlihat inti kebijakan yang dimaksud.

**Tabel 2: Penyediaan Buku Pelajaran Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Thn 1997 sampai sekarang**

Kegiatan	Pemerintah	Swasta	Sekolah
1. Menyusun/mempersiapkan naskah		V	
2. Menerbitkan naskah menjadi buku		V	
3. Menilai buku	V		
4. Memasarkan buku		V	
5. Memilih buku			V
6. Membeli buku			V
7. Mengirim buku ke sekolah		V	
8. Menggunakan buku			V
9. Mengawasi ketersediaan dan pemanfaatan buku di sekolah	V		V
10. Menyediakan dana untuk semua kegiatan	V	V	V

Kebijakan yang dilaksanakan secara bertahap dan dimulai dari SLTP sejak tahun 1997 menunjukkan:

1. Peranan Pemerintah dalam penyediaan buku pelajaran semakin dikurangi dan bergeser ke swasta dan sekolah. Nampaknya kebijakan ini sejalan dengan swastanisasi, desentralisasi dan otonomi serta manajemen berbasis sekolah, yang belakangan ini dikembangkan Pemerintah.
2. Pemerintah menempatkan diri sebagai pengawas mutu pelajaran melalui penilaian dan penetapan buku pelajaran yang memenuhi syarat, dan pengawasan dalam pemanfaatannya di sekolah, serta penyediaan dana pembelian buku pelajaran. Dana tersebut dapat bersumber dari pusat (APBN) dan daerah (APBD).
3. Swasta, dalam hal ini Penerbit, menyediakan naskah, sampai penerbitannya menjadi buku pelajaran dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk dinilai. Sistem penilaian yang dianut memungkinkan beberapa judul buku dari penerbit yang berbeda memenuhi syarat untuk disyahkan sebagai buku pelajaran dalam mata pelajaran yang sama dan kelas yang sama. Penerbit diberikan kebebasan mempromosikan bukunya sesuai dengan tata niaga buku serta bertanggung jawab atas pengiriman buku itu sampai ke sekolah sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan sekolah sebagai pembeli.
4. Sekolah semakin berperan dalam penyediaan buku pelajaran yang dipakai sekolahnya. Sekolah memilih buku pelajaran untuk sekolahnya berdasarkan pertimbangan jumlah dana yang tersedia serta kesesuaian

isi buku dengan karakteristik siswa dan lingkungan setempat. Sungguhpun beberapa buku sejenis dinyatakan memenuhi syarat untuk dipilih namun masing-masing buku itu masih memiliki ciri yang berbeda dalam penyajian, ilustrasi, dan warna. Kewenangan memilih dan membeli buku pelajaran diperoleh oleh sekolah untuk pengadaan buku pelajaran yang dananya dialokasikan ke sekolah. Apabila dananya bersumber dari APBD, pengadaan buku pelajaran dapat dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan setempat.

Penyempurnaan kebijakan dalam buku pelajaran ini diharapkan dapat memecahkan berbagai masalah sebelumnya. Dengan kebijakan ini diharapkan:

1. buku pelajaran yang dipakai di sekolah semakin bermutu karena melalui proses penilaian yang objektif dan menyeluruh (materi, penyajian dan teknik pembelajaran, keterbacaan dan grafika);
2. pembelian buku pelajaran dari penerbit swasta dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan penerbitan buku pelajaran pada khususnya dan industri buku di Indonesia pada umumnya;
3. keterlibatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran memotivasi sekolah menggunakan buku pelajaran lebih efektif dalam upaya meningkatkan mutu proses dan hasil belajar;
4. buku pelajaran tersedia di sekolah pada saat diperlukan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan
5. Pihak swasta/masyarakat dan sekolah juga diikutsertakan dalam pengawasan ketersediaan dan pemanfaatan buku pelajaran serta ikut mengusahakan dan untuk pengadaan buku pelajaran itu.

Seperti dikemukakan sebelumnya, Pemerintah menilai dan mengesahkan buku pelajaran secara bertahap. Untuk keperluan pelaksanaan Kurikulum 2004, Pemerintah baru menyelesaikan penilaian dan pengesahan buku pelajaran untuk Sekolah Dasar. Padahal Kurikulum itu mulai dilaksanakan dalam tahun ajaran 2004/2005 secara bertahap. Sementara itu di pasar telah beredar banyak buku pelajaran SD, SMP dan SMA dengan label "Sesuai dengan Kurikulum 2004". Dengan demikian sekolah kemungkinan menghadapi tiga alternatif berikut:

1. Sekolah memilih buku pelajaran sepenuhnya dari daftar buku pelajaran yang telah disahkan Departemen Pendidikan Nasional (apabila daftar itu telah ada).
2. Sekolah memilih buku pelajaran yang beredar di pasar tapi belum dinilai dan disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
3. Sekolah memilih buku pelajaran dari daftar buku pelajaran yang telah disahkan Depdiknas dan dari yang beredar di pasar bagi mata pelajaran

yang buku pelajarannya belum dinilai dan disahkan Depdiknas.

Mengingat keterlambatan tersedianya daftar buku pelajaran yang disahkan Depdiknas maka sekolah akan banyak memilih alternatif ke 2 dan 3. Hal ini mulai terlihat dalam menyambut tahun ajaran baru 2005 ini sudah terdengar pembebanan pengadaan buku pelajaran SD, SMP, dan SMA kepada orangtua di berbagai sekolah. Seperti tahun-tahun sebelumnya mulai terdengar keluhan klasik orang tua atas harga buku pelajaran yang harus dibayarkan ke sekolah lebih mahal dari harga buku di toko buku serta buku tahun sebelumnya tidak dapat lagi dipakai pada tahun pelajaran sekarang. Keadaan ini terjadi di sekolah negeri dan di sekolah swasta. (Kompas dan Jakarta Post, 9 Juli 2005).

Pemerintah nampaknya masih tetap berkeinginan meringankan beban masyarakat dalam penyediaan buku pelajaran. Berbagai upaya telah ditempuh agar siswa dan guru dapat memperoleh buku pelajaran tepat waktu dan biaya pengadaan buku pelajaran tidak dibebankan kepada orangtua siswa. Akan tetapi dalam kenyataannya karena berbagai kendala nampaknya upaya itu belum sepenuhnya berhasil baik di pendidikan dasar (SD dan SLTP yang menjadi sasaran program wajib belajar) maupun di pendidikan menengah (SMA dan SMK).

Depdiknas menerbitkan daftar buku pelajaran sekolah yang telah disahkan dan sekolah diwajibkan memilih buku pelajaran dari daftar itu. Dalam menghadapi Kurikulum 2004 daftar itu belum tersedia yang berarti sekolah harus memilih buku lain. Dengan demikian sekolah perlu mengetahui teknik memilih buku pelajaran yang sesuai untuk keperluan belajar dan membelajarkan. Dalam menilai dan memilih buku pelajaran, aspek yang perlu diperhatikan ialah (a) isi/materi, (b) metodologi, (c) bahasa, (d) ilustrasi, dan (e) grafika buku.

### **Materi Buku Pelajaran**

Yang perlu diperhatikan dalam menilai materi buku pelajaran ialah:

1. Kesesuaian dengan kurikulum
2. Kebenaran konsep
3. Urutan konsep
4. Contoh
5. Bahan evaluasi

#### **Kesesuaian dengan kurikulum**

Kurikulum merupakan acuan utama dalam pengembangan buku pelajaran. Dalam kurikulum disebutkan tujuan pembelajaran dalam bentuk kompetensi-kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa sesudah mengalami proses pembelajaran. Dengan demikian materi buku pelajaran merupakan hasil

analisis dan uraian lebih lanjut dari kompetensi dan merupakan kumpulan pengetahuan yang perlu diketahui siswa untuk dapat memperoleh kompetensi yang ditetapkan. Dengan demikian penilaian materi buku pelajaran dilihat dari kurikulum mengacu pada hal-hal berikut:

- 1) Apakah materi buku pelajaran telah mencakup semua kompetensi dasar dan indikator yang ditetapkan dalam kurikulum?
- 2) Apakah keluasan materi buku pelajaran telah sesuai untuk mencapai masing-masing indikator kompetensi?
- 3) Apakah kedalaman materi buku pelajaran telah mendukung pencapaian masing-masing indikator kompetensi?
- 4) Apakah semua pokok bahasan dan sub-pokok bahasan telah disusun secara terpadu untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan di dalam kurikulum?
- 5) Apakah isi pokok bahasan untuk masing-masing indikator kompetensi telah disajikan secara seimbang?
- 6) Apakah materi buku pelajaran dapat dipelajari sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia?

#### Kebenaran Konsep

Materi buku pelajaran terdiri atas konsep-konsep dalam bidang ilmu tertentu yang disusun secara sistematis sehingga menjadi teori-teori yang membentuk pengetahuan untuk memperoleh kompetensi yang diinginkan. Oleh karena itu konsep-konsep tersebut harus benar, valid atau relevan dilihat dari disiplin ilmunya. Hal-hal yang perlu dinilai berkaitan dengan kebenaran konsep ialah seperti berikut:

- 1) Apakah sesuai dengan cakupan (*ontology*) disiplin ilmu yang bersangkutan?
- 2) Apakah lengkap untuk mencapai kompetensi yang dikehendaki?
- 3) Apakah kebenaran konsep dapat dipertanggungjawabkan dari ilmu yang bersangkutan?
- 4) Apakah konsep-konsep yang disampaikan masih relevan dengan keadaan sekarang?

#### Urutan Konsep

Susunan dan hubungan konsep berbeda pada masing-masing ilmu. Untuk memudahkan memahami suatu ilmu secara utuh perlu memahami struktur dan hubungan konsep-konsep itu. Aspek-aspek tentang struktur ilmu itu perlu dinilai dari hal-hal berikut:

- 1) Apakah konsep-konsep yang disampaikan disusun berdasarkan hubungan

struktur konsep dalam ilmu tersebut?

- 2) Apakah diawali dengan konsep yang menjadi dasar untuk memahami konsep berikutnya?
- 3) Apakah konsep-konsep disusun secara sistematis?
- 4) Apakah susunan urutan tersebut memudahkan siswa memahami konsep-konsep itu secara keseluruhan?

### Contoh-Contoh

Untuk memudahkan memahami konsep atau teori, apalagi yang bersifat sangat abstrak, perlu diberikan contoh. Contoh yang kurang atau tidak tepat dapat pula membingungkan siswa. Dengan demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menilai contoh-contoh yang dipergunakan menjelaskan konsep yaitu sebagai berikut:

- 1) Apakah relevan dengan konsep yang hendak dijelaskan?
- 2) Apakah memperjelas konsep yang hendak dijelaskan?
- 3) Apakah konkrit atau nyata?
- 4) Apakah mudah dimengerti oleh siswa?
- 5) Apakah menarik bagi siswa?
- 6) Apakah memotivasi siswa untuk mempelajari konsep berikutnya?

### Bahan Evaluasi

Bahan evaluasi dalam bahan ajar biasanya disajikan dalam bentuk soal-soal, latihan, tugas, atau melakukan eksperimen/percobaan. Bahan evaluasi dalam buku pelajaran berfungsi tidak hanya semata-mata untuk mengetahui hasil belajar, akan tetapi kegiatan evaluasi itu merupakan bagian kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu bahan evaluasi perlu dilihat dari hal-hal berikut:

- 1) Apakah mengacu pada tujuan pembelajaran/kompetensi yang hendak dicapai?
- 2) Apakah mengacu pada konsep-konsep yang dipelajari sebelumnya?
- 3) Apakah memperhatikan bidang-bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik?
- 4) Apakah evaluasi memperhatikan tingkat kesulitan?
- 5) Apakah mudah dimengerti?
- 6) Apakah dengan mengerjakan soal-soal, latihan, tugas, atau eksperimen tersebut terjadi proses belajar pada diri siswa?
- 7) Apakah hasil evaluasi tersebut dapat dipergunakan sebagai indikator hasil belajar?
- 8) Apakah memotivasi siswa untuk mempelajari hal-hal yang belum dikuasai dan hal-hal yang baru?

### **Metode Pembelajaran**

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, proses pembelajaran perlu dirancang dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi yang menjadi tujuan, jenis dan sifat materi buku pelajaran, kondisi belajar/pembelajaran, serta karakteristik siswa. Berkaitan dengan metode pembelajaran, hal-hal yang perlu diperhatikan ialah:

- a. Apakah sesuai untuk mencapai masing-masing kompetensi yang dikehendaki?
- b. Apakah sesuai untuk kondisi siswa?
- c. Apakah memperhatikan kondisi lingkungan belajar?
- d. Apakah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi?
- e. Apakah materi buku pelajaran disajikan secara runtut?
- f. Apakah meningkatkan motivasi belajar siswa?

### **Bahasa**

Bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan materi buku pelajaran dari pengembang buku pelajaran kepada siswa. Sebagai alat komunikasi, bahasa ikut menentukan keberhasilan komunikasi atau penyampaian pesan tersebut. Bahasa yang tepat dapat memudahkan pemahaman dan menimbulkan atau meningkatkan motivasi belajar. Dengan demikian penilaian diarahkan pada hal-hal berikut:

- a. Apakah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar?
- b. Apakah struktur kalimat sesuai dengan kemampuan penalaran siswa?
- c. Apakah pilihan kata sesuai dengan pemahaman siswa?
- d. Apakah disajikan secara lugas (tidak berbelit-belit)?
- e. Apakah bahasa yang digunakan menarik bagi siswa?
- f. Apakah tingkat keterbacaan bahasa sesuai dengan kemampuan membaca siswa?
- g. Apakah sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir siswa?

### **Ilustrasi**

Ilustrasi berfungsi untuk menjelaskan konsep sehingga lebih sederhana, jelas dan mudah dipahami. Ilustrasi dapat berbentuk foto, gambar, sketsa, bagan, grafik, peta, dan tabel. Fungsi lain dari ilustrasi ialah dekoratif. Dalam menilai ilustrasi yang perlu diperhatikan ialah:

- a. Apakah ilustrasi relevan?
- b. Apakah bentuknya proporsional?
- c. Apakah bentuknya akurat?

- d. Apakah warnanya sesuai?
- e. Apakah menarik?
- f. Apakah mampu mengungkapkan konsep/objek?
- g. Apakah menyederhanakan konsep/objek?
- h. Apakah menjelaskan konsep/objek?
- i. Apakah memudahkan pemahaman siswa?

### **Produksi/Grafika**

Aspek grafika mempengaruhi minat, motivasi, dan hasil belajar. Aspek ini mencakup:

1. desain/tata letak
2. tipografi
3. kertas, dan
4. produksi

#### **Desain/Tata Letak.**

Desain/tata letak termasuk desain kulit dan desain isi dengan cakupan konsistensi, keharmonisan, daya tarik. Hal-hal yang perlu dinilai seperti berikut:

- 1) Apakah ukuran buku sesuai untuk siswa?
- 2) Apakah desain kulit mewakili isi/bidang studi/disiplin ilmu?
- 3) Apakah ilustrasi kulit buku menarik?
- 4) Apakah komposisi judul, nama pengarang, dan penerbit pada kulit serasi?
- 5) Apakah warna menarik untuk siswa?
- 6) Apakah tata letak isi konsisten dengan pola?
- 7) Apakah ukuran margin efisien?
- 8) Apakah anatomi buku/bagian buku lengkap?
- 9) Apakah perbedaan paragraf jelas?
- 10) Apakah teks dan ilustrasi berdekatan?

#### **Tipografi**

Tipografi mempengaruhi kemudahan membaca dan mencakup ukuran dan bentuk huruf, variasi huruf, panjang baris, spasi, dan jarak antara huruf.

Hal-hal yang perlu dinilai sebagai berikut:

- 1) Apakah ukuran huruf sesuai dengan tingkat kelas?
- 2) Apakah jenis huruf sesuai dengan tingkat kelas?
- 3) Apakah variasi ukuran dan jenis huruf membantu pemahaman?
- 4) Apakah unsur tipografi pada halaman isi mempunyai hirarki yang jelas?
- 5) Apakah panjang baris tidak melelahkan membaca?
- 6) Apakah spasi baris normal?

### Kertas

Di samping mempengaruhi daya tahan buku, jenis dan mutu kertas juga mempengaruhi minat dan motivasi membaca. Berkaitan dengan kertas kulit dan kertas isi buku, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Apakah jenis kertas untuk kulit bebas serat kayu?
- 2) Apakah jenis kertas isi sesuai untuk mata pelajaran?
- 3) Apakah kertas kulit cukup kuat?
- 4) Apakah kertas isi tidak mudah sobek?
- 5) Apakah kertas isi menggunakan mutu kertas yang sama?
- 6) Apakah warna kertas isi tidak silau?

### Produksi

Produksi buku pelajaran adalah hasil pencetakan naskah yang telah disusun oleh pengembang/penulis buku pelajaran. Produksi mencakup mutu cetakan, penjilidan, dan pemotongan. Aspek ini mempengaruhi kemudahan dan kenyamanan menggunakan buku itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah seperti berikut:

- 1) Apakah hasil cetakan tajam?
- 2) Apakah bersih?
- 3) Apakah huruf atau gambar tidak berbayang?
- 4) Apakah tidak tembus ke halaman berikutnya?
- 5) Apakah *registered* antar halaman?
- 6) Apakah hasil cetakan berwarna sesuai dengan aslinya?
- 7) Apakah penjilidan kuat/tidak mudah lepas?
- 8) Apakah pemotongan simetris dan rapi?

### Penutup

Seperti diuraikan sebelumnya buku pelajaran dinilai dari aspek materi, metode pembelajaran, bahasa, ilustrasi dan grafika. Untuk dapat melakukan penilaian dan pemilihan secara objektif, diperlukan keahlian di masing-masing aspek tersebut. Dalam pelaksanaannya, penilaian dan pemilihan buku pelajaran di sekolah dikerjakan oleh tim yang anggotanya melibatkan guru bidang studi dan wakil dari komite sekolah. Buku pelajaran mengandung bahan ajar yang seharusnya disusun secara tepat dan benar dilihat dari disiplin ilmu, metode belajar dan pembelajaran, bahasa, ilustrasi dan grafiknya. Faktor harga memang penting dan ikut menentukan, tetapi hendaknya tidak mendahului kepentingan belajar dan membelajarkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa buku pelajaran yang baik memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam meningkatkan mutu proses dan hasil belajar.

Apabila kebijakan Pemerintah di bidang buku pelajaran telah berjalan dengan baik, sekolah tidak direpotkan lagi dengan masalah-masalah buku pelajaran. Apalagi kalau buku pelajaran dapat dipakai paling singkat lima tahun baik dilihat dari isi maupun fisiknya, maka tidak perlu lagi setiap tahun pelajaran baru, harus ganti buku pelajaran pula. Namun hendaknya digarisbawahi bahwa sebaik atau seburuk apapun mutu buku pelajaran, peranan guru masih tetap lebih utama. Buku yang bermutu apabila dipakai oleh guru yang tidak bermutu dalam proses pembelajaran akan menghadirkan proses dan hasil pembelajaran yang tidak bermutu. Buku yang kurang/tidak bermutu apabila dipergunakan oleh guru yang bermutu akan dapat menghasilkan proses dan hasil pembelajaran yang bermutu. Buku yang bermutu apabila dipergunakan oleh guru yang bermutu pula akan menciptakan suasana, proses, dan hasil pembelajaran yang jauh lebih bermutu.

### Daftar Pustaka

- Althbach, P.G. & Teferra, D. (Eds). (1998). *Publishing and development: A book of readings*. Chestnut Hill: Bellagio Publishing Network
- Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional. ( 1999). *Pembinaan perbukuan nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Chatry-Komarek, M. (1996). *Tailor-made textbooks*. Oxford: CODE Europe
- Jakarta Post*. 9 Juli 2005. Your letters: Supplies of textbooks
- Kompas*. 9 Juli 2005. Buku ajar masih beratkan orang tua
- Pusat Perbukuan. (1994). *Pedoman Pusat Perbukuan*. Jakarta: Pusat Perbukuan.
- Pusat Perbukuan, (1997). *Mekanisme penyediaan buku pelajaran pokok SMP dan sekolah sederajat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sitepu, B.P. (2002). Otonomi penyediaan buku pelajaran dalam *Analisis CSIS*. Tahun XXIX/2000. No 3. Jakarta: CSIS
- Supriadi, D. (2000). *Anatomi buku sekolah di Indonesia*. Yogyakarta: AdiCita
- Suryadi, K., et al (2000). *Pedoman penulisan dan penilaian naskah buku*. Jakarta: Pusat Perbukuan